

**ANALISIS DISPARITAS EKONOMI DAN SOSIAL
PADA 26 PROPINSI DI INDONESIA PERIODE 1995-2000**

SKRIPSI

KK
C 31 / 03
Hid
a

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**



DIAJUKAN OLEH :

**TAUFIK HIDAYADI
No. Pokok : 049514889**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

SKRIPSI

**ANALISIS DISPARITAS EKONOMI DAN SOSIAL
PADA 26 PROPINSI DI INDONESIA PERIODE 1995-2000**

DIAJUKAN OLEH:

TAUFIK HIDAYADI

No. Pokok: 049514889

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. Ec. H. BUSTANI BERACHIM

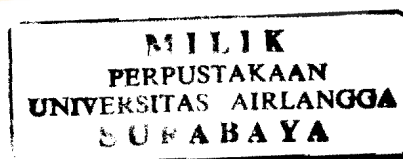
TANGGAL.....

6-5-2003

KETUA PROGRAM STUDI IESP



Dra. Ec. Hj. SRI KUSRENI, MSI



TANGGAL.....

6-5-2003

ABSTRAKSI

Secara ideal pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Berdasarkan tujuan ideal tersebut dapat dikemukakan bahwa peningkatan kesejahteraan (pertumbuhan ekonomi) tidak bisa dilepaskan dari upaya-upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Masalah pemerataan hasil-hasil pembangunan hingga saat ini masih menjadi salah satu prioritas pembangunan mengingat banyak ditemukan fakta bahwa tingkat kesenjangan atau disparitas antar daerah baik dalam aspek ekonomi, kesehatan maupun pendidikan relatif tinggi.

Atas dasar itulah maka penelitian ini ditujukan untuk menelaah kesenjangan antar propinsi-propinsi di Indonesia selama periode 1995-2000 dalam aspek ekonomi dan sosial. Pendekatan yang digunakan adalah metode taksonomik. Secara parsial, dilakukan standarisasi guna menentukan peringkat tiap propinsi berdasarkan 16 variabel ekonomi dan sosial dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Secara integratif dihitung disparitas ekonomi sosial sekaligus selama periode tersebut diatas untuk memperoleh *Human Development Index* (HDI). Disamping itu juga dilakukan pengelompokan variabel berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga diperoleh *Education Development Index* (EDI), *Health Development Index* (HEDI) dan *Economic Development Index* (ECDI). Berdasarkan beberapa indeks perkembangan tersebut dapat ditentukan karakteristik daerah atau propinsi menurut aspek yang dikaji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Propinsi DKI Jaya, Jogjakarta, Bali, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan berdasarkan HDI dapat diklasifikasikan sebagai propinsi yang cukup berkembang (*more development region*). Sedangkan Propinsi Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat terbawah dalam perhitungan HDI. Berdasarkan hasil analisis terhadap EDI, HEDI dan ECDI diketahui bahwa terdapat kaitan positif antara aspek ekonomi dengan aspek kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap disparitas relatif diketahui bahwa aspek pendidikan memiliki tingkat kesenjangan yang relatif besar dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Dengan demikian orientasi pembangunan nasional dalam upaya mengurangi kesenjangan daerah disarankan tidak hanya difokuskan pada kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi belaka akan tetapi juga perlu dipertimbangkan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan.